

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan, BAPPEDA melakukan analisis SWOT sebagai berikut.

Tabel 5.1

Analisis SWOT

Internal		
Kekuatan (S) :	1. Kualifikasi SDM yang baik	2. Data dan informasi pembangunan relatif tersedia
Kelemahan (W) :	1. Belum sesuai dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.	1. Koordinasi antar bidang belum optimal.
Eksternal		
Peluang (O) :	1. Turut serta dalam pengembangan aplikasi perencanaan secara elektronik berbasis web.	1. Mengajukan rancangan peraturan Bupati untuk perubahan organisasi pada fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
1. Proses pengembangan aplikasi e-planning	2. Menyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk menghasilkan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.	2. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan bagi pegawai dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Tantangan (T) : 1. Hasil rekomendasi belum ditindaklanjuti. 2. Masih rendahnya kapasitas keilmuan perencanaan dari para pemangku kepentingan. 3. Tuntutan ketersediaan dokumen yang mantap, berkesinambungan, dan integratif	1. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target. 2. Melakukan peningkatan kapasitas perencanaan pemangku kepentingan. 3. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan.	1. Melakukan sosialisasi dan diskusi hasil perencanaan serta penelitian dan pengembangan. 2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara SKPD. 3. Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui diklat penunjang jabatan fungsional. 4. Membangun kerjasama dengan kementerian, Lembaga, Perangkat daerah dan perguruan tinggi dalam rangka perluasan dan intensifikasi jaringan penelitian.
--	--	---

Hasil analisis SWOT menghasilkan strategi yang dijelaskan sebagai berikut:

Strategi S-O :

1. Turut serta dalam pengembangan aplikasi perencanaan secara elektronik berbasis web.
2. Menyusun SOP pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda untuk menghasilkan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.

Strategi S-T :

1. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian target.
2. Melakukan peningkatan kapasitas perencanaan pemangku kepentingan.
3. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan.

Strategi W-O :

1. Mengajukan rancangan peraturan Bupati untuk perubahan organisasi pada fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
2. Menyelenggarakan bimtek peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan bagi pegawai dalam pelaksanaan fungsi penunjang perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Strategi W-T :

1. Melakukan sosialisasi dan diskusi hasil perencanaan serta penelitian dan pengembangan.
2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan antara SKPD.
3. Mengembangkan jabatan fungsional perencana dan peneliti melalui diklat penunjang jabatan fungsional.
4. Membangun kerjasama dengan kementerian, Lembaga, Perangkat daerah dan perguruan tinggi dalam rangka perluasan dan intensifikasi jaringan penelitian.

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Lebih Sejahtera dan Maslahat.			
MISI 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel, dan responsif. MISI 2. Mewujudkan sumberdaya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah formal dan pondok pesantren. MISI 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. MISI 4. Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. MISI 5. Mewujudkan tata kehidupan sosial masyarakat yang aman, tenteram, religius, harmonis, dan berkebudayaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya perencanaan daerah yang efektif	Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi dan berkelanjutan	Peningkatan sistem pelayanan dan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berbasis pada good governance.	1. Memperbaiki kinerja birokrasi dan mematuhi regulasi guna mewujudkan prinsip-prinsip good governance. 2. Mengembangkan pengelolaan SDM pemerintahan berbasis kompetensi. 3. Menyusun dan mengembangkan SOP serta mengoptimalkan pemanfaatan IT. 4. Mengelola tata laksana pemerintah secara efektif dan efisien.
	Meningkatnya hasil kelitbangan sebagai dasar kebijakan daerah	Peningkatan daya saing sumberdaya manusia melalui pendidikan yang berkualitas.	1. Meningkatkan partisipasi sekolah dan angka melek huruf. 2. Meningkatkan kompetensi bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar. 3. Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dalam pendidikan formal. 4. Mengembangkan pendidikan kewirausahaan dalam pondok pesantren. 5. Meningkatkan kuantitas perpustakaan dan minat baca masyarakat.
		Peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.	1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan. 2. Meningkatkan mutu kesehatan dasar. 3. Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat. 4. Memperbaiki sistem

			jaminan kesehatan masyarakat.
		Pembangunan ekonomi kerakyatan yang inovatif berbasis potensi dan sumberdaya lokal.	1. Menumbuhkembangkan pasar desa dan produk unggulan. 2. Meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal. 3. Menciptakan iklim usaha yang kondusif. 4. Meningkatkan produktivitas pertanian. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM. 6. Mengembangkan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif. 7. Memantapkan sarana dan prasarana wilayah yang memadai.
		Peningkatan tatanan masyarakat yang partisipatif berbasis nilai-nilai budaya lokal dan kelestarian lingkungan.	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban lingkungan. 2. Meningkatkan penegakan hukum dan kewaspadaan keamanan dan ketertiban wilayah. 3. Meningkatkan forum komunikasi antar umat beragama. 4. Menumbuhkembangkan kebudayaan dan kearifan lokal serta pembangunan destinasi yang berwawasan lingkungan. 5. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan tanggap darurat bencana.

Bappeda berusaha meningkatkan kualitas kinerjanya, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pemberian ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan melalui proses Musrenbang. Bappeda juga melaksanakan pengendalian dan pelaporan.

Pada awal tahun 2017 pemerintah telah menerapkan pola kebijakan baru terkait pengalokasian anggaran yang tidak lagi menerapkan prinsip *money follow function*, namun menggunakan prinsip *money follow problem*. Hal ini berarti nomenklatur program

kegiatan harus jelas, berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan. Dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Bappenas sudah menyiapkan perencanaan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu holistik-tematik, integratif, dan spasial. Sejalan dengan kebijakan nasional, pemerintah daerah melalui Bappeda juga akan menjamin terwujudnya *money follow problem* melalui penerapan kebijakan pengintegrasian perencanaan sektoral untuk mendukung konsep pembangunan berbasis spasial.